

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sektor pariwisata di Indonesia semakin berkembang pesat. Hal itu dapat dilihat dengan semakin banyaknya wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke tanah air. Selama Januari hingga Mei 2019, terdapat 6,37 juta wisman dari berbagai macam negara berkunjung ke Indonesia. Angka tersebut meningkat 2,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Hal tersebut dipengaruhi oleh dukungan pemerintah yang selalu mengembangkan aspek pariwisata di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas pariwisata di masing-masing daerah terutama di Provinsi Bali yang merupakan *target captive market* di Indonesia.

Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, maka suatu negara tersebut akan mendapatkan pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata tersebut. Sektor pariwisata mampu berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, karena setiap daerah memiliki daya tarik yang berbeda. Jenis tempat wisata yang ada antara lain adalah pantai, taman laut, hutan, pegunungan, sentra kuliner, tempat bersejarah, museum, danau, waduk, alun-alun, dan lain-lain. Dalam pengembangan potensi pariwisata harus dilakukan sesuai dengan strategi pengembangan objek wisata agar dapat dimanfaatkan bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Majunya

industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung pada jumlah kedatangan jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Dengan adanya pariwisata akan mendatangkan berbagai dampak, utamanya seperti dampak ekonomi, dampak sosial budaya dan dampak lingkungan.

Pariwisata akan menimbulkan dampak besar dalam bidang retribusi serta adanya pajak-pajak dari kegiatan pariwisata yang akan berhubungan langsung dengan negara atau daerah yang memiliki potensi pariwisata. Selain itu, dengan adanya pengeluaran untuk membangun pariwisata akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat dengan ikut serta menunjang fasilitas-fasilitas yang berpengaruh terhadap kegiatan pariwisata.

Pengembangan dan pembangunan obyek wisata serta sarana pendukungnya harus dilakukan secara maksimal dan berlanjut. Upaya dapat meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata di daerah tersebut. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usaha mengembangkan dunia pariwisata didukung dengan UU No 10 Tahun 2009 bahwa "Keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan menguntungkan diantaranya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat".

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 11 ayat 4, menjelaskan, Kepariwisata adalah seluruh kegiatan wisata dan berbagai

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Semakin meningkatnya objek pariwisata di suatu daerah semakin meningkat juga pendapatan daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor utama dan terpenting dalam kegiatan peningkatan kualitas pariwisata. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat menumbuhkan dan memperkuat pemerintah dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 menerangkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa proses penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan wewenang dan peluang kepada Kabupaten/Kota sebagai titik berat pelaksanaan otonomi daerah untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Ini merupakan titik yang strategis bagi daerah untuk menggali,

mengembangkan, dan mengelola asset asset yang dimiliki serta memberdayakan pembangunan perekonomian setempat.

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menggali laju pertumbuhan daerah di Indonesia. Pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam pengembangan daerah tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Pembangunan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 1 adalah upaya dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara keseluruhan dan merata.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibanding sumber lain diluar Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dikarenakan Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan non PAD sifatnya terikat. Pemerintah juga diharapkan dapat mengembangkan Pendapatan Asli Daerah dengan Amanah dan sebaik-baiknya sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi;

# وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهَ تَخُونُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمَانَاتِكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Adapun penjelasan tentang amanah melalui HR Abu Dawud yang berbunyi;

عَنْ وَقَيْسِ الْعَلَاءِ ابْنِ قَالَ شَرِيكَ عَنْ عَنَامِ بْنِ طَلْقٍ حَدَّثَنَا قَالَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ وَأَحْمَدُ الْعَلَاءِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا  
مَنْ إِلَى الْأَمَانَةِ أَدِّ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ صَالِحِ أَبِي عَنْ حُصَيْنِ أَبِي  
خَانَكَ مَنْ تَخُنَ وَلَا انْتَمَنَكَ

Artinya : “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!”

Sektor strategis perlu dicermati yang memiliki potensi besar untuk menopang pembangunan di daerah masing-masing, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 5 menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan diperoleh dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Dana Perimbangan
3. Pendapatan Daerah Lain yang Sah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 menerangkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa proses penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Pembangunan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 1 adalah upaya dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara keseluruhan dan merata.

Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki objek wisata paling besar. Hal itu ditunjukkan dengan 4.651.334 wisman masuk dari Bandar Udara Ngurah Rai dibandingkan dengan Bandar Udara Soekarno Hatta yang hanya sebesar 1.870.771 wisman, Juanda 185.372 wisman, Kualanamu 181.510 wisman, dan Husein Sastra Negara 115.140 wisman. Total ada 7.396.533 wisman yang masuk dari pintu udara Indonesia dari Januari-September 2019. Hal itu dikarenakan Provinsi Bali sudah menjadi iconic dari pariwisata Indonesia.

**Tabel 1.1** Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara per Bulan ke Indonesia Menurut  
Pintu Masuk Udara, 2017-2019

<b>BANDAR UDARA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Keterangan</b>
Ngurah Rai (Bali)	5.628.248	6.025.760	6.239.543	Meningkat
Soekarno Hatta (Jakarta)	2.749.321	2.814.586	2.419.196	Fluktuatif
Juanda (Surabaya)	247.166	320.529	243.899	Fluktuatif
Kualanamu (Medan)	246.551	229.586	244.530	Fluktuatif
Husien Sastranegara (Bandung)	166.857	155.566	144.964	Menurun
Adi Sucipto (DIY)	145.673	138.822	113.028	Menurun
Int. Lombok (Lombok)	123.388	79.807	57.763	Menurun

Sumber: BPS Provinsi Bali

Bali merupakan Provinsi dengan objek pariwisata terbesar di Indonesia. Tidak hanya menyajikan keindahan alam yang menawan, Provinsi Bali juga memiliki keberagaman adat dan budaya. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah objek wisata yang terbilang banyak di Provinsi Bali

**Tabel 1.2** Jumlah Objek Wisata Di Provinsi Bali 2012-2016

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
Badung	33	33	36	36	36
Bangli	13	14	14	14	14
Buleleng	38	57	57	57	57
Denpasar	24	24	24	24	24
Gianyar	16	16	16	16	16
Jembrana	17	17	17	17	17
Karangasem	15	15	15	15	15
Klungkung	21	28	28	31	31
Tabanan	22	22	22	22	22

Sumber: BPS Provinsi Bali

Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Bali yang juga diikuti oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat, tidak menutup kemungkinan akan semakin berkembangnya pariwisata di Provinsi Bali. Hal ini juga akan berpengaruh dalam peningkatan kualitas masyarakat dan perekonomian masyarakat Bali. Bali akan terus



maju dengan berkembangnya masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan aspek lainnya tanpa menghapus keberanekaragaman adat dan budaya. Hal inilah yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengolah Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mewujudkan Bali yang lebih maju. Pemerintah Daerah harus optimal berupaya mengajak masyarakat untuk mengelola, mengembangkan, dan melestarikan objek wisata. Hal ini perlu dilakukan karena sektor pariwisata ini akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan yang memiliki nilai jual. Inovasi dan kreativitas sangat diperlukan dalam mengembangkan objek wisata pantai dan perlu adanya suatu pelayanan maksimal yang harus diberikan kepada wisatawan agar merasa puas dan ingin berkunjung kembali. Inovasi yang bisa dilakukan dapat seperti memberikan layanan akomodasi, konsumsi, cindramata, dan lain-lain. Hal tersebut tentunya akan menambah daya tarik wisatawan lokal maupun asing.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Wisata Pantai Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali” Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pariwisata terutama pantai terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali ?
2. Bagaimana pengaruh jumlah restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali?
3. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap Pendapata Asli Daerah Provinsi Bali ?

### **C. BATASAN MASALAH**

Batasan masalah untuk dalam penelitian ini akan membuat penelitian lebih efisien. Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahun yang digunakan adalah tahun 2012-2017
2. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh jumlah hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali
2. Untuk bagaimana pengaruh jumlah restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali

3. Untuk bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

### a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat memperluas wawasan dan pengalaman yang diharap dapat bermanfaat. Peneliti juga dapat menerapkan pengalaman dari penelitian untuk mengembangkan sektor pariwisata.

### b. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini akan menjadi acuan atau referensi untuk peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga akan memberikan informasi tentang bagaimana kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bali

### c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pembangunan terutama dalam sektor pariwisata. Penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pemerintah akan pentingnya pengembangan sektor pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali.